

Wedding Planner Harapkan PPKM Level 4 Tidak Diperpanjang Lagi

BOGOR (IM)- Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat atau Level 4 diharapkan tak lagi diperpanjang usai diperpanjang hingga 2 Agustus mendatang. Hal itu diutarakan Muhammad Ade Septian (33) pemilik Forever Blue Organizer yang kerap menanggapi pesta pernikahan atau sebagai wedding planner.

Ia mengeluhkan akibat kebijakan maupun aturan PPKM Darurat atau Level 4, banyak kliennya yang ingin melangsungkan resepsi pernikahan membatalkan atau menunda pelaksanaannya hingga waktu yang tak jelas. "Sebagai wedding planner, tentunya kami berharap kebijakan PPKM Darurat atau Level 4 segera berakhir menjadi lebih luwes lagi, hal itu karena dengan kebijakan saat ini acara resepsi pernikahan tidak diperbolehkan sama sekali," ucapnya kepada wartawan, Selasa (27/7).

Alumni Universitas Pajajaran ini menerangkan dengan dilaksanakannya protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, harusnya acara resepsi pernikahan bisa tetap dilangsungkan. "Kunciannya itu di pelaksanaan Prokes Covid-19 dan jumlah undangan yang terbatas sesuai kapasitas gedung tempat resepsi, kalau itu dilakukan maka resiko penyebaran wabah virus korona (Covid-19) pun bakal berkurang hingga kami minta point aturan larangan resepsi pernikahan

diperluwas atau dilonggarkan," terangnya.

Tian sapaan pria penyuka band progressive metal Dream Theater ini menuturkan bahwa resepsi pernikahan adalah hak dasar manusia dewasa, hingga pelarangannya tidak boleh dilakukan dalam waktu yang lama. "Akibat pelarangan resepsi pernikahan, tak hanya hak dasar pasangan pengantin dan keluarganya saja yang tak bisa mereka dapatkan, tetapi juga mempengaruhi pendapatan para wedding planner, usaha jasa tenda, dekorasi, make up, penyewaan pakaian, video maupun fotografer," tutur Tian.

Ayah satu orang anak ini menjelaskan sebelum kebijakan aturan PPKM Darurat atau Level 4, event organizer juga terpengaruh kebijakan larangan rapat di hotel-hotel yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada Tahun 2015 lalu.

"Waktu kebijakan larangan rapat di hotel-hotel yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, kami sebagai event organizer masih bisa beralih ke wedding planner. Saat ini dengan kebijakan PPKM Darurat atau Level 4, kami bingung mau usaha apalagi, untung saja di Kabupaten Bogor ada beberapa desa yang minta dibuatkan profilnya, namun hal itu tidak bisa diandalkan karena anggaran pemerintah desa juga diprioritaskan untuk menanganai wabah Covid-19," jelasnya. ● pp

20 Bus BTS di Kota Bogor akan Diuji Coba

BOGOR (IM)- Masa lelang untuk operator bus By The Service (BTS) di Kota Bogor akan berakhir pada akhir Juli 2021. Setelah masa lelang berakhir, diperkirakan akan ada 20 dari 75 bus yang diuji coba.

Pi Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Saptandri Widjanto mengatakan, 20 bus yang akan diuji coba itu akan beroperasi di sejumlah koridor yang akan disesuaikan. Diketahui, ada enam koridor di Kota Bogor yang akan digunakan untuk operasional bus BTS. "Bus yang diterima jumlahnya 75 bus, dan persiapan operasional itu 20 bus kita uji coba, dengan koridor menyesuaikan, kita rundingkan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor," kata Saptandri, Selasa (27/5).

Saptandri mengatakan, program dari BPTJ ini pertama kali dilaksanakan di Kota Bogor. BTS di Kota Bogor ini merupakan pilot project yang diharapkan dapat diikuti oleh kota-kota lain se-Jabodetabek. Sementara, di kota-kota lain sudah berjalan dengan program dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dia menyatakan, Kota Bogor dipilih menjadi pilot project BTS di Jabodetabek karena Kota Bogor memberikan respons yang baik dengan mengajukan proposal. "Tujuannya juga in line dengan program Kota Bogor, yakni konversi angkutan kota (angkot). Ada satu bus, diharapkan dapat menghilangkan tiga angkot, atau 3:1," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, selain ada enam koridor yang akan beroperasi, ada 99 shelter yang disiapkan. Di mana, 54 di antaranya merupakan milik Pemkot Bogor dan sisanya milik BPTJ.

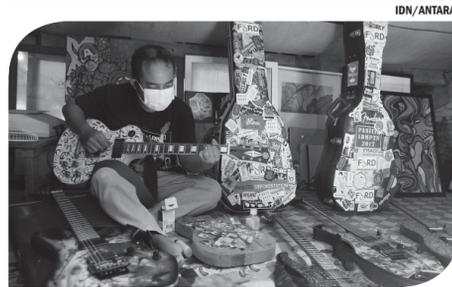
"Shelter itu ada 99, yang 54 milik Pemkot Bogor, dan sisanya BPTJ, dan akan ditambah shelter atau halte portable. Tarifnya selama setahun diberikan free dulu, baru tahun berikutnya melihat perkembangannya. Ini adalah subsidi karena pilot project," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna menilai, adanya program bus BTS merupakan lompatan besar untuk Kota Bogor. Sebab, dengan adanya kesempatan ini, stigma Kota Bogor sebagai "Kota Sejuta Angkot" bisa diubah.

Yayat mengatakan, bus BTS bisa menjadi pilar dasar perubahan angkutan umum, dengan adanya pengurangan angkot melalui konversi angkot. "Kemudian, keinginan ke depannya, Bogor akan menjadi salah satu model di mana angkot atau feeder akan dibayari pemerintah atau subsidi," tuturnya.

Sementara Kasi Angkutan Dalam Trayek pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Mochamad Yaffies memaparkan, angkot yang akan direduksi adalah angkot yang berada di lima trayek utama Kota Bogor, yaitu 02, 03, 09, 12, dan Trans Pakuan Koridor (TPK) 5 jurusan Warung Jambu-BTM. Nantinya, ada sekitar 168 unit angkot yang akan bertransformasi menjadi bus.

Sekadar diketahui, sejak 2020 hingga 2021, sudah ada 121 unit angkot yang direduksi melalui program konversi angkot 2:1. Sehingga, saat BTS beroperasi nanti ada total 289 unit angkot yang tereduksi. "Jumlah angkot di Kota Bogor hingga 2020 ada 3.412. Bilamana bus BTS beroperasi, jumlah angkot yang ada menjadi 3.123 unit kendaraan," ujarnya. ● gio



GITAR KOLASE LIMBAH KERTAS

Perajin membuat gitar listrik kolase limbah kertas di Sapen, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (27/7). Gitar yang dijual Rp1,5 Juta - Rp5 Juta tergantung kualitas bahan dan kerumitan desain tersebut banyak dipesan pembeli di Amerika, Australia, Meksiko, Belanda, Malaysia dan Singapura

UNTUK BANTU WARGA TERDAMPK PPKM

Minyak Jelantah 'Disulap' Jadi Sembako

BOGOR (IM)- Komunitas Leuit Jajaka, Kota Bogor, Jawa Barat memanfaatkan limbah rumah tangga untuk menjadi sarana amal membantu masyarakat terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Komunitas yang didominasi muda-mudi asal Kota Hujan ini mengumpulkan minyak jelantah untuk dijual, kemudian hasilnya akan disumbangkan kepada warga terdampak kebijakan PPKM. "Setelah terkumpul banyak, kami jual ke pengelola biodiesel. Uangnya kami belikan sembako lalu dibagikan ke warga yang terdampak Covid-19," ujar Koordinator Lapangan Komunitas Leuit Jajaka, Agung Prayoga, Selasa (27/7).

Menurutnya, limbah minyak goreng tersebut dikumpulkan dari anggota maupun donatur. Meski aksi kepedulian ini baru berjalan selama satu bulan, namun sudah mampu menyulap minyak jelantah menjadi 50 paket sembako. "Sampai hari ini kami sudah menyalurkan sekitar 50 paket sembako untuk warga yang terdampak," ujar Agung. Gerakan kemanusiaan dengan tagline 'Milenial Peduli'

ini teretus mengingat banyak masyarakat Kota Bogor yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Utamanya yang pekerjaannya terdampak kebijakan PPKM Darurat. "Saat rapat muncul ide mengumpulkan minyak jelantah karena mudah didapat, dimiliki semua masyarakat. Dan juga sebagai bentuk menjaga lingkungan," jelas Agung.

Tak hanya minyak jelantah, anggotanya pun melakukan pemanfaatan botol plastik bekas untuk dijual. Lalu hasilnya didonasikan bagi warga terdampak PPKM Darurat maupun pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah.

Komunitas Leuit Jajaka juga mengajak masyarakat yang mampu untuk ikut mendonasikan minyak jelantah maupun botol plastik bekas. Hal ini untuk membantu meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini. "Karena dari hasil analisa bahwa, permasalahan berujung kepada perekonomian. Karenanya kami akan terus melakukan aksi ini untuk warga yang membutuhkan," pungkasnya. ● gio

8 Nusantara



IDN/ANTARA

RUMAH ISOLASI MANDIRI DI KAMPUS UNISBA

Seorang petugas merapikan kamar yang akan dijadikan ruangan isolasi bagi pasien COVID-19 di Kampus II Unisba, Ciburial, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/7). Kampus Unisba bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta organisasi sosial mengalihfungsikan tiga asrama dengan kapasitas 100 tempat tidur untuk dijadikan tempat isolasi pasien tanpa gejala COVID-19

Pemprov Jabar Diminta Antisipasi Gelombang PHK Dampak PPKM

Pemda Jabar diminta segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat. Jangan terkesan latak dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur, kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto.

BANDUNG (IM)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta Pemprov Jabar untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Jawa Barat sebagai imbas dari penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

"Kami meminta Pemda Jabar, segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat. Jangan terkesan latak dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur. Dalam hal ini pemda harus bertindak cepat, melakukan konsolidasi

tersendiri untuk merumuskan sebuah skema seperti yang terjadi pada skema pemulihan ekonomi," kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto, di Bandung, Selasa (27/7). Selain itu menurut Bambang, untuk mengantisipasi dampak gelombang PHK yang terjadi saat ini Pemprov Jabar selain melibatkan seluruh stakeholder juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bambang mengatakan BUMD memiliki peranan penting untuk dapat memberikan akses bantuan permodalan bagi para pelaku usaha dan masyarakat sehingga dampak dari PHK akibat PPKM Darurat dapat diminimalisir.

"Melibatkan badan usaha milik daerah untuk menyediakan akses permodalan bagi para pelaku usaha, sehingga dampak PHK dari perpanjangan PPKM Darurat ini dapat

diminimalisir," kata dia

Sementara itu, kebijakan untuk memperpanjang PPKM dinilai memiliki dampak di berbagai sektor seperti sektor ekonomi yang memiliki penurunan pendapatan per kapita, terlebih khusus ekonomi yang terus menurun.

Pemerintah harus membuat gerakan untuk menaikkan pendapatan masyarakat khususnya sektor ekonomi informal.

Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat, Yunanda Eka Perwira mengatakan PPKM merupakan suatu pilihan untuk fokus dalam kesehatan dan ekonomi dapat tetap berjalan.

Menurut Yunandar PPKM merupakan salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan yang diambil oleh pemerintah terutama untuk menyeimbangkan antara bagaimana mengatasi dampak kesehatan dan dampak ekonomi.

"Kita mau betul-betul fokus di kesehatan maka sebenarnya

mobilitas harus betul-betul dibatasi karena ternyata penyebab utama dari menyebarnya COVID-19 dalam mobilitas masyarakat juga. Dan itu tidak bisa kita hindari karena masalah ekonomi masyarakat Jawa Barat pada umumnya memang tergantung kepada mobilitas sampai hari ini," kata Yunandar.

Dia mengatakan ada tiga solusi kepada Pemprov Jawa Barat khususnya untuk UMKM, petani dan nelayan yang terdampak PPKM Darurat.

Menurut dia, pemerintah harus hadir langsung dan juga bekerja sama dalam penanganan memajukan sektor ekonomi di Jawa Barat saat PPKM Darurat. "Yang pertama tadi bagaimana meng-online kan UMKM. Kedua adalah bagaimana sekarang sektor pertanian tadi itu bisa dijual dengan cepat kepada pasarnya. Itulah fungsi dari pusat distribusi provinsi yang harus diberikan oleh pemerintah," kata dia. ● pur

Pemkot Cirebon Pertimbangkan Usulan Gedung DPRD Jadi Tempat Isolasi

CIREBON (IM)- Pimpinan DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, mengusulkan agar gedung DPRD digunakan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19. Pemkot mengaku perlu menimbang dan mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut.

Kendati demikian, Pemkot Cirebon mengaku masih berupaya mengoptimalkan sejumlah tempat isolasi yang ada. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi mengaku belum ada koordinasi resmi dengan DPRD terkait usulan tersebut.

"Yang kita miliki di BKKBN saja belum kita gunakan. Tentu (usulan DPRD) ini perlu perhitungan, karena banyak yang harus disiapkan, seperti tempat tidur, logistik, toilet harus terpisah, pengamanan dan lainnya. Sehingga, untuk membahas gedung dijadikan sebagai tempat isolasi itu banyak variabel yang harus dibahas," kata Agus kepada awak media di kantornya, Selasa (27/7).

"Selama ini belum kita bahas. Kita berterima kasih kepada teman-teman dewan yang mengusulkan opsi itu. Tapi kami belum pernah membahas," kata Agus menambahkan.

"Kalau untuk kantor BKKBN belum digunakan, ada 40 bed," kata Agus.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitri Pamungkaswati mendukung agar gedung DPRD menjadi tempat isolasi. Menurut dia, gedung DPRD ideal untuk dijadikan tempat isolasi.

"Ya sekarang mengingat dan menimbang pemda ini keuangannya kan sudah kolaps. Jadi kalau di sini mending aja. Sudah ready. Tinggal tambah ekstra bed. Untuk teknis bisa dibicarakan. Pada prinsipnya mendukung, tergantung pemda," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah mengatakan usulan gedung DPRD digunakan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19 bergejala ringan sebagai upaya dalam meringankan beban APBD, dalam menangani pandemi Covid-19.

Sekadar diketahui, hingga hari ini kasus Covid-19 belum melandai. Pemerintah pun memperpanjang PPKM. ● pur



GEBYAR VAKSINASI ANAK DAN REMAJA

IDN/ANTARA

Tenaga kesehatan melakukan pendataan kesehatan kepada anak saat mengikuti vaksinasi COVID-19 di Graha Asia, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (27/7). Sebanyak 1.000 anak mengikuti gebyar vaksinasi COVID-19 bagi anak dan remaja berusia 12-17 tahun yang diselenggarakan oleh Polres Tasikmalaya bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kota Tasikmalaya sebagai upaya menekan lonjakan penularan virus corona.

Cakra Amiyana Resmi Duduki Kursi Sekda Kab. Bandung

BANDUNG (IM)- Bupati Bandung, Dadang Supriatna resmi mengumumakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten, Selasa (27/7).

Terpilihnya Cakra Amiyana menjabat Sekda Kabupaten Bandung disetujui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam surat bernomor 821/3948/SJ tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Persetujuan Mendagri tersebut disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bandung.

"Alhamdulillah setelah mendapat persetujuan dari Mendagri, maka Cakra Amiyana, yang sekarang menjabat Kepala Bappeda Kabupaten Bandung akan segera sanyantik menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung definitif, sebelum bulan Agustus," ucap Bupati Dadang Supriatna dalam keterangan tertulisnya.

Cakra Amiyana mengaku bersyukur atas terpilih dirinya sebagai Sekda Kabupaten Bandung, dan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Bupati Bandung memilih dirinya sebagai sekda. Ami, sapaan Cakra Amiyana menyatakan dirinya

siap menjalankan amanah untuk melaksanakan tugas selaku Sekda Kabupaten Bandung dalam mewujudkan visi misi Bupati Bandung.

"Alhamdulillah, saya mohon doa dan dukungan seluruh OPD Kabupaten Bandung, dukungan dari rekan-rekan media juga. Karena media juga menjadi salah satu faktor sukses keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat Kabupate Bandung yang BEDAS, Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera. Amin," ujarnya.

Seperti diketahui, Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bandung mengumumkan tiga besar nama calon Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Rabu (9/6). Ketiga nama calon sekda itu yakni Akhmad Djohara, Asep Wahyu, dan Cakra Amiyana (nama disusun berdasarkan abjad).

Penetapan ketiga calon berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor: 820/24/PANSEL/2021 Tanggal 08 Juni 2021. Ketiga nama calon itu direkomendasikan oleh Panitia Seleksi kepada Bupati Bandung, untuk kemudian ditetapkan dan dilantik sebagai sekda. ● pur

Honor Pengamanan PPKM Darurat di Garut Diduga Disunat

GARUT (IM)- Sejumlah petugas di Garut yang melakukan pengamanan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mengeluhkan adanya potongan honor pengamanan. Nilai potongan bervariasi, namun rata-rata ratusan ribu rupiah. Salah seorang petugas pengamanan dari salah satu dinas di Pemerintahan Kabupaten Garut, Asep (bukan nama sebenarnya), menyebut seharusnya dia menerima honor pengamanan sebesar Rp1,8 juta untuk pengamanan PPKM Darurat, 3 hingga 20 Juli 2021. "Hitungannya per hari itu yang saya tahu sebesar Rp100 ribu. Tapi saya kemarin saya hanya menerima Rp900 ribu saja," ujarnya, Selasa (27/7).

Asep mengungkapkan, tidak hanya dia yang mengalami pemotongan honor. Rekan-rekannya yang lain pun mengalami hal yang sama. "Jadi yang harusnya Rp1,8 juta, yang diterima hanya setengahnya," ungkapnya. Jika mereka hanya menerima Rp900 ribu, lain

halnya dengan petugas di atasnya. Mereka diinformasikan menerima Rp1,2 juta. "Lebih besar dari kami memang, tapi tetap saja ada potongan Rp600 ribu," katanya.

Asep mengaku tidak mengetahui secara pasti kenapa jatahnya dipotong. Namun dia tidak berani mempertanyakan lebih jauh.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Aah Anwar Seifuloh membantah honor petugas PPKM Darurat disunat. "Pengajuannya bertahap 3 kali, sesuai perkembangan," kata Aah. Dia memastikan setiap petugas yang melakukan penjagaan dibayar Rp100 ribu per hari, baik dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, hingga Satpol PP. Semua mendapat jumlah yang sama.

Aah menyatakan tidak ada potongan sama sekali, termasuk untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH). "Semua utuh Rp100 ribu dikali 18 hari, jadi Rp1,8 juta, tidak ada potongan," tutup Aah. ● pur